

AKSESIBILITAS KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DALAM MENGAKSES SUMBER MODAL

Mardiyono

Peneliti Madya Pada Perwakilan BKKBN Prov Jawa Timur

Email: mardiyonolisa@yahoo.co.id

Abstract: In the year 1990s through the UPPKS group loan assistance from the venture capital fund Mandiri Foundation is growing very rapidly. The scheme was launched when it was Skim Takesra and Kukesra. By the year 1997 the number of UPPKS groups have approached the amount of 700 thousand groups throughout Indonesia. With the end of the cooperation between the BKKBN with Independent Fund Foundation, the scheme Takesra Kukesra Mandiri has not renewed. For a few years later there is vacuum venture capital assistance so that in 2003-2004 was started on social assistance or loan capital of the state budget funds. Overview of this study to identify the knowledge of program managers to access capital sources, identify readiness range of capital sources to implement the existing schemes and identify ways to increase access to capital UPPKS group. The design of this research is descriptive qualitative. The informants method consists of the Field KS, financial institutions, agencies, both public and private capital, field officers and UPPKS group. The techniques used in this study is the determination of the informant sample group (sample group). In this study data collection used three techniques, namely: engineering FGD (Focus Group Discussion), in-depth interviews (depth interview) and documentation. The results of this study concluded that (1) Policy and commitment: MOU with BRI and pawnshops in 3 locations are still the way that the mortgage due in accordance with the commitment, (2) the availability of capital, namely the cooperation between the Ministry of cooperatives and SMEs with Bank Rakyat Indonesia (BRI) through the Business Credit (KUR), and cooperation between the State Owned Enterprises (SOEs) with the banks. (3) Knowledge capital: Lack of socialization provided by financial institutions that have SME programs so that people in general do not know the program. (4) Source informant capital: promotion of the dissemination of leaflets and brochures as well as participate in completing activities at key moments such as the exhibition of products with the PKK, product promotion meetings by the Department of Institutions se Mojokerto and others. (4) Management UPPKS group: if the source of the capital of the central BKKBN is not there then they will find it hard to obtain capital relief and will seek the assistance loans from other financial institutions.

Keywords: Accessibility, UPPKS Group, Capital Resources

Abstrak: Pada tahun 1990an Kelompok UPPKS melalui bantuan pinjaman modal usaha dari Yayasan Dana Mandiri berkembang sangat pesat. Skim yang diluncurkan saat itu adalah Skim Takesra dan Kukesra. Menjelang tahun 1997 jumlah kelompok UPPKS telah mendekati jumlah 700 ribu kelompok diseluruh Indonesia. Dengan berakhirnya kerjasama antara BKKBN dengan Yayasan Dana Mandiri maka Skim Takesra Kukesra sudah tidak diperpanjang lagi. Untuk beberapa tahun kemudian terjadi kekosongan bantuan modal usaha sehingga pada tahun 2003-2004 mulai diberikan bantuan sosial atau pinjaman modal usaha dari dana APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan pengelola program terhadap akses sumber modal, mengidentifikasi kesiapan

jajaran sumber modal untuk mengimplementasi skim yang ada dan mengidentifikasi cara peningkatan kelompok UPPKS mengakses modal. Penelitian ini dirancang deskriptif kualitatif dengan Informan terdiri dari Bidang KS, lembaga keuangan, lembaga pemberi modal baik pemerintah maupun swasta, PLKB dan kelompok UPPKS. Adapun teknik yang digunakan dalam penentuan informan penelitian ini adalah sampel kelompok (group sample). Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan tiga teknik, yaitu: teknik FGD (Focus Group Discussion), wawancara mendalam (depth interview) dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Kebijakan dan komitmen: MOU dengan BRI dan pegadaian di 3 lokasi yang masih jalan yaitu dengan pegadaian karena sesuai dengan komitmen, (2) Ketersediaan modal yaitu dengan kerjasama antara Kementrian Kopersi dan UKM dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kerjasama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pihak perbankan. (3) Pengetahuan permodalan: Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh lembaga keuangan yang mempunyai program UKM sehingga masyarakat pada umumnya belum mengetahui program tersebut. (4) Sumber informan permodalan: promosi dengan penyebaran leaflet maupun brosur serta ikut dalam mengisi kegiatan pada momen-momen penting seperti kegiatan pameran produk dengan PKK, kegiatan pertemuan promosi produk oleh Dinas Instansi se Kabupaten Mojokerto dan lain-lain. (4) Pengelolaan kelompok UPPKS: apabila sumber permodalan dari BKKBN pusat sudah tidak ada maka mereka akan kesulitan untuk memperoleh bantuan permodalan dan akan mengusahakan adanya bantuan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.

Kata kunci: Aksesibilitas, Kelompok UPPKS, Sumber Modal

PENDAHULUAN

Dengan adanya paradigma baru era Desentralisasi, beberapa hal dalam pengelolaan kelompok UPPKS sudah tidak sesuai lagi. Terutama bila dikaitkan dengan issue perkembangan Program KB Nasional, dimana dalam pelaksanaan Desentralisasi Program KB belum menjadi prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten/Kota. Alasan yang dikemukakan karena Program KB tidak langsung memberikan kontribusi bagi pembangunan. Selain itu pula adanya kebijakan pimpinan agar seluruh kegiatan KB (termasuk kegiatan beyond family planning) dapat memberikan kontribusi terhadap pemakaian kontrasepsi sehingga pada saatnya akan memberikan dampak bagi penurunan TFR.

Pada tahun 1990an Kelompok UPPKS melalui bantuan pinjaman modal usaha dari Yayasan Dana Mandiri berkembang sangat pesat. Skim yang diluncurkan saat itu adalah Skim Takesra dan Kukesra. Menjelang tahun 1997 jumlah kelompok UPPKS telah mendekati jumlah 700 ribu kelompok diseluruh Indonesia. Dengan berakhirnya kerjasama antara BKKBN dengan Yayasan Dana Mandiri maka Skim Takesra Kukesra sudah tidak diperpanjang lagi. Untuk beberapa tahun kemudian terjadi kekosongan bantuan modal usaha sehingga pada tahun 2003-2004 mulai diberikan bantuan sosial atau pinjaman modal usaha dari dana APBN.

Pada awal tahun 2009 jumlah kelompok UPPKS yang terdata melalui Data Basis Kelompok UPPKS mendekati angka 60 ribu kelompok UPPKS tepatnya yaitu 58.336 kelompok UPPKS (89,75%). Perkembangan kelompok UPPKS tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam memberikan dukungan permodalan. Dari jumlah

kelompok UPPKS yang tercatat dalam data basis kelompok UPPKS tersebut sebagian besar (71 %) masih berada dalam tahapan Kelompok UPPKS Dasar . Selebihnya adalah kelompok Berkembang (26 %) dan kelompok Mandiri (3 %).

Keseluruhan proses tersebut selama ini sangat tergantung kepada pemerintah (pusat dan daerah). Hal ini dicermati sebagai pemberdayaan kepada sasaran secara pasif dimana sasaran berperan sebagai obyek, bukan sebagai subyek. Akibat yang ditimbulkan, pada saat *permodalan tidak dibantu, kegiatan pendampingan dan pembinaan tidak dilakukan kecenderungan kelompok akan mati atau tidak aktif terutama kelompok-kelompok bentukan baru*. Pada dasarnya setiap kelompok UPPKS pada akhirnya diharapkan untuk mandiri. Namun demikian BKKBN dapat memfasilitasi akses untuk mendapat bantuan modal usaha yang bersumber dari berbagai pihak antara lain dari : APBN/APBD, PERBANKAN, BUMN/BUMD dan dari Dana Program Pemerintah/Swasta.

Untuk bisa memperoleh bantuan modal usaha, kelompok UPPKS harus terdaftar dalam Data Base Kelompok UPPKS. Agar dana dimanfaatkan secara bertanggungjawab, maka bantuan/kredit modal diupayakan ke kelompok UPPKS penerima bantuan/kredit yang benar-benar mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif dan dikelola dengan baik. (sumber: UPPKS (*Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera*) SEBAGAI WADAH PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PESERTA KB, BKKBN, tahun 2009).

Hasil identifikasi penelitian terdahulu dimana Kinerja Kelompok UPPKS (PUSRA, 2008) ditemukan kondisi pelaksanaan kegiatan kelompok UPPKS di lokasi penelitian sebagai berikut : (1). Kelompok UPPKS yang dilaporkan melalui Dalap adalah kelompok yang pernah dibentuk mulai proyek income generating dipercepat dengan kelompok bentukan saat diluncurkannya Takesra, Kukesra dan Skim-Skim derifatnya (Kukesra Mandiri, KPKU). (2). Persentase Keluarga Pra KS dan KS 1 yang ikut aktif berusaha dalam kelompok UPPKS di era Desentralisasi pada rentang 30-50 persen (Pengguna Bansos/APBN). (3). Kriteria tahapan kelompok dalam data basis kelompok UPPKS tidak jelas panduannya dan tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah (terutama dalam hal pelatihan dan akses modal). (4). Beberapa kabupaten Kota (Bantul – DIY, Grobogan, Jateng) bisa mengakses antara 3-5 sumber modal untuk kelompok UPPKS diluar Skim Bansos/APBN. (5). Kelompok bentukan Takesra/Kukesra yang sudah tidak mendapat bantuan dana Takesra/Kukesra, sejak MOU BKKBN dengan Yayasan Damandiri berakhir, tidak dibina lagi dan menjadi kelompok yang pasif. (6). Kondisi terakhir (2008) di tingkat kabupaten /kota para pengelola program : Tidak paham terhadap akses informasi Program dan Sumber Modal UPPKS; tidak memiliki buku-buku panduan, Juklak/Juknis mengenai UPPKS. (7). Bagi kabupaten/kota yang baru (pengembangan, atau yang terbatas tenaga PKB/PLKBnya, tidak mekasimal dalam mengelola kelompok UPPKS (Program dan operasional kegiatan kelompok UPPKS dilakukan secara serabutan).

Permasalahan pengelolaan UPPKS yang ditemui dalam penelitian Evaluasi Kinerja kelompok UPPKS antara lain : (a). SKPDKB kurang memperoleh akses sumber informasi pengelolaan kelompok UPPKS (buku pedoman, sumber modal, dsb). (b). Kelompok-kelompok UPPKS yang pasif tidak dibina. (c). Pembentukan kelompok yang instan dan massive menyebabkan kelompok UPPKS yang dilaporkan Dalap masih lebih tinggi dibandingkan dengan Data Basis UPPKS.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan UPPKS adalah bahwa kegiatan kelompok UPPKS pada umumnya merupakan kegiatan administrative, belum melakukan kegiatan KB dan kebijakan tahun 2009 dengan semakin dibatasinya kontribusi

pemerintah untuk memberikan bantuan modal pinjaman, maka pimpinan menetapkan bahwa mulai tahun 2010 bantuan pinjaman modal usaha dari APBN sudah tidak ada lagi. Dengan adanya MOU antara BKKBN dengan beberapa lembaga keuangan (misalnya PT Pegadaian, BRI) diharapkan kedepan Kelompok UPPKS lebih banyak yang memanfaatkan Kredit tersebut.

UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera). Diawal tahun 1990 UPPKA diubah menjadi UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera dengan cakupan yang lebih luas, antara lain dengan melibatkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber KB, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan keluarga lain yang peduli menjadi anggota kelompok UPPKS. Kesungguhan kelompok dalam mengelola usaha ekonomi produktif menumbuhkan keyakinan dan kepedulian pemerintah, sehingga sejumlah pengusaha swasta dan BUMN memberikan dukungan dalam bentuk bantuan modal usaha yang harus dikembalikan dengan bunga ringan yang dikelola oleh Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM). Selanjutnya YDSM bersama-sama Bank BNI yang dibantu PT Pos Indonesia serta Bank BRI mengembangkan Skim Kredit Takesra Kukesra, KPKU, dan KPTTG. Namun kerjasama tersebut berakhir pada bulan Januari tahun 2003 dengan penarikan semua modal yang beredar sehingga banyak kelompok yang terlantar dan drop out.

Landasan hukum mengenai pengelolaan UPPKS yang terakhir adalah Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 332/HK.010/F3/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui Bantuan Modal Usaha Kelompok UPPKS. Serangkaian legal aspek yang telah dikeluarkan tersebut sebagai bukti keseriusan Pemerintah dalam mengelola Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Secara empiris pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan UPPKS dapat dijelaskan dari serangkaian hasil-hasil penelitian sebagai berikut: Penelitian Evaluasi Kegiatan UPPKS, Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup IKIP Yogyakarta dan BKKBN, tahun 1994. Hasil Penelitian menunjukkan peningkatan ketrampilan khusus (teknis produktif) diperlukan anggota, pelatihan ketrampilan administrasi diperlukan bagi pengurus kelompok UPPKA. Variabel kemudahan bahan baku, pemasaran, kelengkapan pengurus, dan intensitas pembinaan merupakan variable yang sangat menentukan keberhasilan dan kemajuan UPPKA. Persentase kelompok UPPKA tahap dasar hampir sama dengan tahap berkembang masing-masing 47,3 persen dan 46,9 persen. Analisis statistik korelasi multivariate (kanonik) untuk UPPKA menghasilkan temuan: sumbangan efektif dari variable input terhadap proses = 8 persen, variable proses terhadap output = 6 persen, dan variable output terhadap outcome= 33 persen.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dewasa ini menjadi primadona dikalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). KUR salah satu program yang bertujuan memberikan pinjaman modal kepada UMKM agar dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Semula KUR diselenggarakan oleh 6 bank milik BUMN yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bukopin dan Bank Syariah Mandiri. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mulai tahun 2010 penyelenggara KUR diperluas dari 6 Bank menjadi 19 Bank. Ketiga belas Bank tersebut adalah : Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jabar – Banten, BPD DKI, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Selatan, BPD Kalimantan Tengah, BPD DI Yogyakarta, BPD Nagari, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Sulawesi Utara, BPD Maluku, BPD Papua.

Penyaluran KUR dibagi menjadi 2 bagian yakni KUR Mikro yang diberikan tanpa agunan dengan jumlah kredit Rp 5 Juta, pada tahun 2010 jumlah KUR tanpa agunan dikembangkan menjadi Rp 20 juta. Sementara KUR Makro diberikan maksimal Rp 500 juta. Persyaratan Utama pengajuan KUR yaitu : (1) telah memiliki usaha yang berjalan minimal 6 bulan (2) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (3). Surat keterangan usaha (SKU) dari Desa/Kelurahan. BRI menjadi penyalur terbesar KUR karena BRI melayani kredit Rp 5 juta hingga Rp 500 juta, sedangkan Bank-bank lainnya tidak melayani KUR Rp 5 juta. (sumber : surat kabar *Sambung Hati* Edisi 109/4-10 Oktober 2010).

Begitu juga dengan Bank Mandiri dengan kredit usaha Mikro dengan persyaratan yang hampir sama, hanya saja di Bank Mandiri menggunakan fotokopi bukti pembayaran PBB/Listrik/Telp/PAM dan jaminan Fixed asset (BPKB/AJB/SHGB/SHM) dengan bunga 1,9% flat per-bulan. (sumber : Brosur Mandiri Mikro).

Selain itu di Bank BTN juga memberikan KUR, usaha yang dapat dibiayai KUR adalah usaha produktif dengan kategori UMKM dengan sektor usahanya: Industri, Dagang dan Jasa. Usaha harus sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun dan juga merupakan usaha dalam kategori usaha layak tetapi tidak bankable (Feasible not bankable). Jenis Kredit dari BTN ada 2 yaitu KUR Modal kerja (kredit jangka pendek untuk pembayaran modal kerja) dan KUR Investasi (kredit untuk pembiayaan investasi barang modal. Adapun jenis KUR ada 3 yaitu bagi usaha mikro, UMKM perorangan dan UMKM berbadan usaha. (sumber : Brosur Bank BTN).

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM yang menyatakan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan oleh Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dianggap telah berhasil, bahkan KUR menjadi proyek percontohan bagi Negara-negara anggota Asia Pasific Economic Cooperation atau disingkat APEC (Rakyat Merdeka, terbitan Selasa 26 Oktober 2010 hal 3). Lebih lanjut diuraikan oleh Menteri Koperasi &UKM dalam perbincangannya dengan Rakyat Merdeka di kantor Kementerian Koperasi & UKM bahwa program KUR dianggap berhasil karena telah menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Program-program yang dianggap berhasil adalah KUR,PNPM, Raskin, Askes, yang dinilai sukses dalam menjalankan misinya.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Perluasan Akses Terhadap Modal.

Dampak yang terjadi akhir-akhir ini adalah program-program penanggulangan kemiskinan cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin sebagai program kompensasi atas pencabutan subsidi. program pembangunan (berbasis pertumbuhan) yang dijalankan pemerintah akhir-akhir ini mengalami banyak kelemahan yang fundamental dalam mengentaskan kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat miskin harus dirancang berdasarkan analisa yang mendalam tentang kemiskinan dan faktor sosial ekonomi lainnya. masyarakat menjadi miskin bukan karena malas, melainkan karena produktifitasnya rendah. Produktivitas yang rendah itu diakibatkan oleh kurangnya akses dalam bidang ekonomi (modal), kesehatan dan pendidikan. salah satu jalan pengentasan kemiskinan adalah dengan cara memutus mata rantai kemiskinan tersebut. Dan salah satu caranya adalah dengan membuka akses modal kepada masyarakat miskin sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mengakumulasi modalnya hingga semakin meningkat secara gradual, pada akhirnya kesejahteraan akan meningkat. Sistem keuangan (lembaga keuangan, bank beserta regulasinya) yang ada di negara kita saat ini memang dirancang bukan untuk masyarakat miskin. Dan kebijakan pemerintah

terutama dalam memberikan kredit juga kurang memperhatikan aspek sosiokultural, sehingga kebijakan ini justru berperan dalam membentuk stigma dan bahkan budaya malas dan korup pada masyarakat miskin.

Atas dasar itu, skema atau sistem keuangan yang dibangun dalam rangka memperluas akses modal harus berbasis pemberdayaan yang mempertimbangkan aspek sosiokultural masyarakat. Sebelum melangkah lebih jauh untuk menentukan skema atau kebijakan perluasan akses modal kepada masyarakat miskin, satu hal yang sangat penting adalah merumuskan definisi kemiskinan yang tepat untuk mendukung target pengentasan kemiskinan yang akurat. Definisi ini dirumuskan berdasarkan observasi di lapangan serta dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada untuk menjalankan program tersebut. Permasalahan utama masyarakat miskin dalam mengakses modal adalah ketiadaan jaminan secara materi bagi pemberi modal (kreditor). Masalah inilah yang menyebabkan mereka sampai saat ini tidak tersentuh sama sekali oleh lembaga keuangan yang ada. Hal ini karena lembaga keuangan hanya akan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank (*bankable*).

Jadi, skema kredit berbasis pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat miskin adalah yang meniadakan jaminan berupa materi dan menggantinya dengan jaminan yang bersifat in-materi. Jaminan itu tak lain adalah berupa modal sosial (*social capital*) yang terbentuk dalam masyarakat miskin terutama masyarakat desa. Sehingga skema penyaluran modal selain mempertimbangan aspek pemberdayaan juga dirancang dengan mengeksplorasi kekuatan modal sosial yang ada.

Sebagai tahap awal, pengucuran bantuan modal memang dalam skala kecil dan proses administrasinya pun relatif sangat sederhana. Seberapa besar modal yang akan dikucurkan akan sangat tergantung pada kemampuan kita dalam mengumpulkan modal awal dan pengelolaannya serta berapa target anggotanya.

Adapun pengucuran kredit UPPKS dibagi beberapa tahapan berikut ini peminjam dibagi dalam kelompok yang memiliki latar belakang pemikiran dan kondisi sosial ekonomi yang relatif sama. Anggota kelompok terdiri dari 5 orang dan harus muncul atas inisiatif peminjam. Inisiatif mula-mula muncul dari satu orang yang menjelaskan tentang tata cara bank ke orang kedua begitu seterusnya sampai jumlahnya mencapai 5 orang. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai kelompok, maka tiap-tiap anggota kelompok harus diuji pengetahuannya tentang kebijakan-kebijakan bank dan jika masing-masing anggota kelompok sudah memahami maka kelompok tersebut secara resmi disahkan menjadi kelompok peminjam bank. Sehingga kelompok yang terbentuk adalah terdiri dari orang-orang yang benar-benar butuh, serius dan memiliki keinginan keras untuk memperbaiki hidupnya. Setelah kelompok terbentuk maka pertama-tama bank akan meminjamkan kepada dua anggota terlebih dahulu, dalam kurun waktu tertentu (misalnya satu atau dua bulan) pinjaman dapat dicicil secara reguler, maka itu menjadi syarat peminjaman tahap kedua untuk dua anggota diberikan lagi begitu juga sampai tahap ketiga untuk satu anggota sisa. Merumuskan insentif yang membuat masing-masing anggota kelompok bisa saling mendorong keberhasilan usaha masing-masing. Iklim persaingan yang konstruktif baik sesama anggota kelompok maupun antar kelompok. Bank memberikan pilihan sedangkan kelompok memutuskan dan menyetujui besarnya pinjaman kelompok. Karena kelompoklah yang menyetujui pinjaman anggotanya maka kelompok memiliki tanggung jawab moral atas pinjaman.

METODE

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive sampling di 2 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Jawa Timur dan Papua. Alasan pemilihan ketiga provinsi tersebut adalah: (1) JAWA TIMUR sebagai Provinsi Penyangga Utama yang penyerapan modalnya rendah. (2) SULAWESI UTARA sebagai Provinsi Pengembangan yang penyerapan modalnya tinggi.

Dari masing-masing Provinsi secara purposive sampling diambil 2 (dua) kabupaten dan dimasing-masing kabupaten yang penyerapan modalnya rendah ataupun tinggi diambil 1 (satu) kecamatan. Setiap Provinsi diambil 2 Kabupaten dengan penyerapan tinggi dan rendah Provinsi Jawa Timur yaitu di: Kabupaten Mojokerto, dengan penyerapan modalnya tinggi. Kabupaten Gresik, dengan penyerapan modalnya rendah. Provinsi Sulawesi Utara yaitu di: Kota Tomohon, dengan penyerapan modalnya rendah dan Kab. Minahasa, dengan penyerapan modalnya tinggi.

Sedangkan dari tiap Kabupaten akan diambil 1 (satu) Kecamatan yaitu dengan mengikuti kriteria pemilihan di atasnya. Kecamatan terpilih diambil 1 (satu) Kelompok UPPKS di 1 (satu) Desa dengan ketentuan Kelompok tersebut sudah terdaftar dalam data basis UPPKS dan PPKBD /Sub-PPKBD di lokasi penelitian aktif. Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Kelompok UPPKS

NO	RESPONDEN / INFORMAN	JUMLAH	CARA PENGUMPULAN DATA
1.	PROPINSI :		
	a. Bidang KS	1	Indepth Interview
	b. Lembaga Keuangan	2	<i>Idem</i>
2.	KABUPATEN/KOTA :		
	a. Bidang KS	2	Indepth Interview
	b. BRI	2	<i>Idem</i>
	c. Pegadaian	2	<i>Idem</i>
3.	DESA/KELURAHAN :		
	1. PKB/PLKB	2	Indepth Interview
	2. Kelompok UPPKS	12	Diskusi Kelompok
	(@ Klp UPPKS = 6 org pengurus)		
	JUMLAH	23	

Sumber: data primer 2015

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Komitmen. MOU dengan BRI dan Pegadaian di 2 lokasi penelitian yang masih jalan yaitu dengan Pegadaian karena sesuai dengan komitmen. Sedangkan BRI tidak ada yang jalan karena antara komitmen dengan kenyataan dilapangan berbeda. Berbedanya adalah dalam brosur yang ada bahwa kredit tanpa agunan, akan tetapi kenyataannya menggunakan agunan. Selain itu bunga yang dibebankan terlalu besar yaitu sekitar 16 % sehingga kelompok UPPKS merasa keberatan. Pada prinsipnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan, namun dalam pelaksanaannya pemohon bantuan pinjaman untuk kredit usaha diharuskan mempersiapkan jaminan walaupun sifatnya di bawah

tangan. Seperti tinjauan yang disampaikan oleh: Gianto dalam makalahnya yang disampaikan sebagai pengantar diskusi Rapat Kerja *Community Development* UI yang mengatakan bahwa: Sistem keuangan (lembaga keuangan, bank beserta regulasinya) yang ada di negara kita saat ini memang dirancang bukan untuk masyarakat miskin. Dan kebijakan pemerintah terutama dalam memberikan kredit juga kurang memperhatikan aspek sosiokultural, sehingga kebijakan ini justru berperan dalam membentuk stigma dan bahkan budaya malas dan korup pada masyarakat miskin.

Sedangkan Pegadaian juga menggunakan agunan akan tetapi tidak diambil hanya dicatat oleh petugas dari Pegadaian dan bunga setiap bulannya hanya 0,9% Informan Pegadaian belum mengetahui tentang adanya kelompok UPPKS karena baru 9 (Sembilan) bulan, demikian juga halnya tidak mengetahui adanya MOU/ komitmen antara BKKBN dengan Pegadaian. Karena komitmen tersebut belum diketahui informan maka kelanjutan dari komitmen tersebut juga masih dipertanyakan oleh yang bersangkutan. Hal ini sangat disayangkan, bagaimana mungkin seorang petugas belum mengetahui komitmen-komitmen yang ada, harusnya dia mempelajari dokumen-dokumen yang ada karena kalau belum mengetahui akan menghambat kerjasama dan menghambat kelancaran dalam penyaluran bantuan pinjaman modal.

Pembentukan kelompok masih ada yang dari Provinsi, hal ini sebenarnya untuk mempercepat jumlah kelompok yang menerima bantuan pinjaman modal. Ternyata kelompok UPPKS yang dibentuk oleh provinsi, justru yang banyak menimbulkan masalah. Karena mereka itu dibentuk sendiri tanpa koordinasi dengan Kabupaten/Kota sehingga begitu ada permasalahan barulah diserahkan ke Kabupaten/Kota. Bedanya dengan kelompok UPPKS yang lama yaitu kelompok UPPKS yang merupakan bentukan Provinsi, mengangsur pinjamannya langsung disetorkan ke Provinsi. Kelompok-kelompok tersebut ada yang dari kelompok lansia yang langsung diberikan bantuan modal, pada hal mereka tidak mempunyai usaha dan mereka menganggap bahwa itu merupakan bantuan atau sumbangan, sehingga mereka tidak mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran. Selain itu ada juga kelompok usaha ekonomi produktif yang disponsori salah satu fungsionaris partai, yang akhirnya tidak mau mengangsur karena dianggap bantuan dari Fungsionaris tersebut.

Ketersediaan Modal. Sebenarnya banyak institusi yang menawarkan pinjaman untuk modal di tingkat kecamatan. Namun demikian pendekatan harus dilakukan melalui strategi yang tepat sehingga bantuan pinjaman modal usaha dapat diperoleh dengan bunga rendah tanpa agunan demi terselenggaranya kegiatan usaha bagi kelompok UPPKS. Hal ini tergantung dari kejelian petugas dari BKKBN untuk memanfaatkan pertemuan-pertemuan untuk mengenalkan atau menginformasikan keberadaan kelompok-kelompok UPPKS.

Program pemberian bantuan pinjaman bagi pengusaha kecil telah dipersiapkan oleh beberapa instansi maupun pihak perbankan sendiri. Hal ini dapat dilihat antara lain kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Demikian juga masih ditemukan berbagai program lainnya melalui kerjasama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pihak Perbankan. Sebenarnya banyak peluang kelompok UPPKS untuk mengakses sumber-sumber pinjaman modal. Hanya saja dari pihak lembaga keuangannya yang baru setengah hati untuk membantu memberikan pinjaman modal bagi kelompok UPPKS yang notabene usahanya ada yang baru belajar dan juga modalnya kecil. Disampaikan lebih lanjut oleh: Gianto dalam makalahnya pada Rapat Kerja *Community Development* UI

mengatakan bahwa permasalahan utama masyarakat miskin dalam mengakses modal adalah ketiadaan jaminan secara materi bagi pemberi modal (kreditor). Masalah inilah yang menyebabkan mereka sampai saat ini tidak tersentuh sama sekali oleh lembaga keuangan yang ada. Hal ini karena lembaga keuangan hanya akan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank.

Pengetahuan Akses Permodalan. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh lembaga keuangan yang mempunyai program UKM, sehingga masyarakat pada umumnya belum mengetahui program tersebut. Sangat disayangkan bahwa masih ada pengelola kelompok UPPKS yang mengatakan bahwa sumber permodalan yang dapat diakses hingga saat ini hanyalah dari BKKBN. Hal ini sangat disayangkan, pada hal diluar sana banyak sekali sumber-sumber modal yang bisa diakses oleh kelompok UPPKS. Sekarang tergantung pada pengelola kelompok UPPKS saja yang melakukan pendekatan pada pihak Perbankan/lembaga keuangan agar supaya mau memberikan pinjaman modal tanpa agunan dengan bunga yang ringan. Karena kelompok UPPKS itu adalah kelompok yang baru mulai usaha, akan tetapi tidak semuanya seperti itu, ada juga kelompok UPPKS yang usahanya sudah berjalan.

Sumber Informasi Permodalan

Promosi dengan penyebaran leaflet maupun brosur serta ikut dalam mengisi kegiatan pada momen-momen penting seperti kegiatan pameran produk dengan PKK, kegiatan pertemuan promosi produk oleh Dinas Instansi se Kabupaten. Salah satu informan dari salah satu lokasi penelitian yang mempertanyakan pada Ketua kelompok UPPKS bahwa mengapa keluarga prasejahtera tidak diberikan bantuan pinjaman modal ? Dan jawaban yang diberikan adalah bahwa ketua kelompok sebagai penanggungjawab tidak bersedia tanggung renteng apabila Keluarga Prasejahtera gagal mengembalikan angsuran. Hal ini bagaimana bisa terjadi, bantuan pinjaman modal sebenarnya untuk keluarga Pra Sejahtera yang mempunyai usaha dan Ketua kelompok biasanya diambil dari keluarga yang tahapannya sudah mapan yaitu pada tahap KS III. Keluarga Prasejahtera umumnya gagal mengangsur sehingga terjadi kegagalan usaha dan ini harus ditanggung oleh ketua dan anggota lainnya. Inilah yang dihindari oleh ketua kelompok UPPKS Melati. Keluarga Pra sejahtera tidak dapat mengembalikan angsuran karena habis dikonsumsi, tetapi bagi keluarga sejahtera I umumnya kegiatan usahanya bisa berjalan lancar dan dapat membayar angsuran.

Mekanisme Pengajuan Bantuan Modal. Untuk mekanisme pengajuan bantuan pinjaman modal, pada dasarnya hampir sama semua. Akan tetapi ada juga persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal usaha ditentukan sendiri oleh lembaga Keuangan yang bersangkutan. Antara lain seperti persyaratan yang disampaikan oleh Koperasi Wanita (KOPWAN) yaitu harus Perempuan yang memiliki kegiatan usaha, memiliki foto copy Kartu Tanda Penduduk, memiliki ijin usaha dari Kepala Desa setempat dan lain-lain.

Fasilitasi Kebutuhan Kelompok UPPKS. Kalau dilihat dari jadwal pertemuan yang dilaksanakan Informan SKPDKB Kabupaten/Kota menyatakan bahwa pembinaan dilakukan melalui forum pertemuan PPLKB yang dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan, itu berarti mekanisme operasionalnya sudah jalan, sehingga sangat efektif sekali bila itu berlanjut karena bisa dimanfaatkan untuk mendapat laporan yang rutin dari petugas

lapangan dan Kader. Selain itu terdapat juga pertemuan dengan staf PLKB yang dilakukan sekali dalam sebulan. Lebih lanjut disampaikan bahwa PLKB dan PPLKB membina kelompok UPPKS, sedangkan Kabid. PP dan SDM melakukan pertemuan sekali dalam sebulan. Ini berarti bahwa pembinaan terhadap anggota kelompok UPPKS dilakukan baik oleh PKB dan PPLKB juga dibina oleh Kabid PP dan KB Kabupaten. Tidak demikian halnya ada juga provinsi yang tidak mau membina karena kelompok tersebut merupakan bentukan provinsi yang dengan mudah mendapatkan kucuran dana, sementara kelompok UPPKS yang sudah antre belum mendapatkan giliran.

Pengelolaan Kelompok UPPKS. Apabila sumber permodalan dari BKKBN Pusat sudah tidak ada maka mereka akan kesulitan untuk memperoleh bantuan permodalan dan akan mengusahakan adanya bantuan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Yang penting dan paling utama adalah bunga yang harus dibayarkan oleh anggota kelompok UPPKS rendah. Hampir diseluruh provinsi bahwa anggota kelompok UPPKS sangat mengharapkan bantuan pinjaman modal usaha dari BKKBN. Hal ini disebabkan karena persyaratan yang diberi kan oleh BKKBN cukup lunak dan dapat memahami apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Buku Pedoman Pengelolaan UPPKS hingga saat dilakukannya penelitian ini menurut informan tidak ditemukan lagi, maka bagaimana mereka akan mengelola kelompok UPPKS jika buku pedomannya aja tidak ada. Jadi janganlah lapangan disalahkan jika terjadi kekeliruan dalam mengelola karena tidak adanya buku pegangan sebagai pedoman pengelolaan kelompok UPPKS.

Pembinaan terhadap anggota kelompok UPPKS dilakukan sekali sebulan di rumah Ketua Kelompok UPPKS. Diinformasikan pula bahwa dalam pembinaan tersebut mereka menanyakan pada pengurus kelompok UPPKS, apakah usahanya berjalan dengan baik atau terdapat masalah yang harus segera ditanggulangi. Akan lebih bagus lagi jika kelompok mewajibkan untuk menabung atau membayar iuran setiap bulan, dengan demikian kelompok mempunyai modal sendiri.

PENUTUP

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya banyak institusi yang menawarkan pinjaman untuk modal di tingkat kecamatan. Namun demikian pendekatan harus dilakukan melalui strategi yang tepat sehingga bantuan pinjaman modal usaha dapat diperoleh dengan bunga rendah tanpa agunan demi terselenggaranya kegiatan usaha bagi kelompok UPPKS. Hal ini tergantung dari kejelian petugas dari BKKBN untuk memanfaatkan pertemuan-pertemuan untuk mengenalkan atau menginformasikan keberadaan kelompok-kelompok UPPKS.

Para Pembina kelompok UPPKS sudah banyak yang mengetahui dan memperjuangkan kelompok UPPKS supaya bisa mengakses sumber lain. Hal ini terlihat dengan gigihnya mereka memberikan informasi pada setiap pertemuan dengan unit dan instansi lain. Masyarakat mengetahui bahwa ada program UKM dari promosi dengan penyebaran leaflet maupun brosur serta ikut dalam mengisi kegiatan pada momen-momen penting seperti kegiatan pameran produk dengan PKK, kegiatan pertemuan promosi produk oleh Dinas Instansi.

Sudah banyak yang memberikan kredit usaha mikro, akan tetapi yang masih tetap jalan adalah dari Perum Pegadaian, sedangkan bantuan dari APBD hanya ada di prov Jawa

Timur. Sumber-sumber dana yang ada di lapangan yaitu : KUR (BRI), Krista, Bank Pasar, APBD dan Koperasi Wanita (Kopwan).

Belum banyak kelompok UPPKS yang mendapatkan pinjaman dari Pegadaian, karena masih banyak hambatan-hambatannya. Diantaranya adalah kebijakan dari Pegadaian Pusat yang mengatakan supaya berhenti dulu untuk pencairan pinjaman, karena masih banyak yang menunggak.

Kebijakan yang ditempuh oleh BRI dengan mempersiapkan agunan walaupun dilakukan secara terselubung diiringi oleh besaran bunga sebanyak 14 persen menjadi penyebab gagalnya kelompok UPPKS memperoleh bantuan pinjaman.

Program pemberian bantuan pinjaman bagi pengusaha kecil telah dipersiapkan oleh beberapa instansi maupun pihak perbankan sendiri. Hal ini dapat dilihat antara lain kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Demikian juga masih ditemukan berbagai program lainnya melalui kerjasama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pihak Perbankan. Hanya saja dari pihak lembaga keuangannya yang baru setengah hati untuk membantu memberikan pinjaman modal bagi kelompok UPPKS yang notabene usahanya ada yang baru belajar dan juga modalnya kecil. Hal ini menunjukkan belum siapnya jajaran pemberi modal untuk mengimplementasi skim yang ada.

Agar supaya terjadi peningkatan kelompok UPPKS dalam mengakses modal maka Pembina kelompok UPPKS mencarikan sumber modal selain dari BKKBN dengan bunga yang rendah dan tanpa agunan dan juga harus sering melakukan pendekatan dengan sumber-sumber modal. Istilah tanggung renteng perlu dipertimbangkan lagi, karena ada Ketua kelompok UPPKS yang tidak mau melibatkan anggotanya dari tahapan keluarga Pra Sejahtera, yang dianggap tidak bisa mengangsur karena pinjaman tersebut digunakan untuk konsumtif. Pada hal keluarga Pra Sejahtera merupakan sasaran dari kelompok UPPKS. Saat ini terdapat bantuan pinjaman untuk permodalan yang disiapkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh Lima Juta Rupiah) tiap kelompok merupakan dana hibah dari Pemerintah Daerah dan dapat diakses ditingkat kecamatan.

Saran. Perlunya penelitian yang mengevaluasi lembaga keuangan dalam menyediakan modal bagi UKM dan selain sumber modal dari BKKBN maka diperlukan Sosialisasi dari lembaga keuangan yang mempunyai program UKM. Untuk pengentasan kemiskinan sebaiknya Bank Pemerintah Daerah lebih berperan dengan memberikan bantuan pinjaman modal pada kelompok UPPKS di wilayahnya. Bunga pinjaman dan agunan perlu disesuaikan dengan sasaran UKM.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), (1994) Penelitian Evaluasi Kegiatan UPPKS, Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup IKIP Yogyakarta dan BKKBN, BKKBN Jakarta.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), (1997). Petunjuk Tehnis Pengembangan Kelompok UPPKS Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera, Kantor BKKBN Jawa Timur.

- Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), (1997) Strategi Pengembangan Kelompok UPPKS dalam Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera, Kantor BKKBN Jawa Timur.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), (1997) Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kelayakan Usaha Kelompok Prokesra UPPKS, Kantor BKKBN Jawa Timur.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), (1997) Petunjuk Tehnis Penetapan Usaha Potensial Bagi Kelompok UPPKS, Kantor BKKBN Jawa Timur.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), (1999) Panduan Pengelolaan Pemanfaatan Dana Bergulir UPPKA-KB Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Kelompok UPPKS melalui Koperasi Pegawai BKKBN, BKKBN Jakarta.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), (2009) UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) Sebagai Wadah Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peserta KB, BKKBN Jakarta.
- Boediono, (1989) Ekonomi Mikro Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian I, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Gianto, (1997) UPPKS BKKBN Disampaikan Sebagai Pengantar Diskusi Rapat Kerja Community Development UI, (1997:15).
- Moeljadi, (1996) Penggunaan Sumber Modal Perusahaan (1996:25).
- Subardjo Darmojuwono dan Subagiyo Pangestu, 1986. Pelaksanaan Kelompok UPPKS di Jawa Tengah (1986:17).